

**IMPLEMENTATION OF PROVISIONAL DISAPPOINTMENT IN CLASS 1
CORPORATE INSTITUTIONS CIREBON (CASE STUDY IN CLASS 1
CORPORATE INSTITUTIONS CIREBON)**

Oleh :

Anggun Purnamiwulan Ubaiyadi

E1A116078

ABSTRAK

Salah satu dari pidana pokok adalah pidana penjara, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang narapidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak narapidana, salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon memberikan Pembebasan Bersyarat sebagai hak dari narapidana. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan yakni, Bagaimanakah pelaksanaan Pelepasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dan Hambatan-hambatan Pelepasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Dengan teknik, teknik pengumpulan data, data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun untuk mendapatkannya dengan tahapan sebagai berikut, *pertama* pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di usulkan oleh Tim Pengamat Masyarakat kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, *kedua* diteruskan kepada Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *ketiga* usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hambatan-hambatan ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan Bersyarat adanya hambatan Yuridis, hambatan Administrasi, seperti keluarga Narapidana yang tidak mau menjadi penjamin, dan lingkungan masyarakat yang sulit menerima Narapidana kembali.

Kata kunci : Narapidana, Pelepasan Bersyarat, Pembebasan, Pembinaan

**PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGAN
PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON)**

**Oleh:
Anggun Purnamiwulan Ubaiyadi
E1A116078**

ABSTRACT

One of the main penalties is imprisonment, imprisonment is a crime in the form of limiting the freedom of movement of an inmate, which is carried out by closing the person in a correctional institution, by requiring people to obey all the rules and regulations that apply in the correctional institution, associated with a disciplinary action for those who violate the regulation. according to Article 14 Paragraph (1) of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, regulates the rights of prisoners, one of the rights of prisoners is to obtain parole. Class 1 Cirebon Penitentiary provides parole as a right of prisoners. For this reason, in this paper, the author raises several problems, namely, How is the implementation of Conditional Release in Class 1 Cirebon Penitentiary and Barriers to Conditional Release in Class 1 Correctional Institution Cirebon. The research method used in this research is the sociological juridical method. With techniques, data collection techniques, primary data and secondary data. From the results of the author's research, the implementation of parole in Class 1 Cirebon Penitentiary is in accordance with Article 14 paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. As for getting it in the following stages, firstly, the implementation of the granting of parole is proposed by the Community Observer Team to the head of the Correctional Institution, secondly it is forwarded to the Office of the Regional Ministry of Law and Human Rights, the three proposals are forwarded to the Directorate General of Corrections, and if approved a Decree on parole will be issued by the Directorate General of Corrections on behalf of the Minister. This study uses a sociological juridical method with descriptive research specifications. The types and sources of data used are primary data obtained directly from informants and secondary data obtained through library research. Obstacles found in the implementation of parole are juridical obstacles, administrative obstacles, such as the families of prisoners who do not want to be guarantors, and the community environment that is difficult to accept prisoners back.

Keywords: Prisoners, parole, release, coaching